

LAPORAN KINERJA
(LKj)
SKPD KECAMATAN KINTAP TAHUN 2024
UNTUK TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

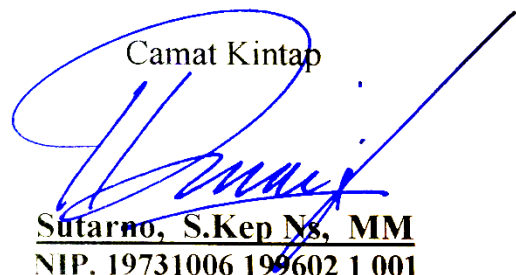
Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT kerana tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kintap dapat menyelesaikan LAKIP Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kintap, 19 Januari 2024

Camat Kintap

Sutarno, S.Kep Ng, MM
NIP. 19731006 199602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF



Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu : “TANAH LAUT BERINTERAKSI” yaitu Berkarya , Inovatif , Tertata, Religius, Aktual dan Sinergis maka Kecamatan Kintap sebagai salah satu bagian dari wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki visi dan misi untuk mendukung visi misi

Kabupaten Tanah Laut , yaitu : “Mewujudkan pelayanan yang optimal dengan Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius dan Aktual serta Sinergis - BERINTERAKSI”

Adapun misi nya adalah :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, dalam tahun 2023 Kecamatan Kintap telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase jumlah capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap pada tahun keempat Renstra 2018-2023, target indeks kepuasan masyarakat adalah 89, dan tercapai nilai 88,80. mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 86,28

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	89	88,80	99,77 %

Target Pendapatan Daerah melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil pada Tahun 2023 ini ditiadakan, dan diserahkan kewenangannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.

Belanja SKPD Kecamatan Kintap Pada tahun 2023 dipergunakan untuk membiayai 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Total APBD Murni sebesar Rp 4.957.639.051.00.-. Setelah adanya APBD perubahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan Kintap mengalami penurunan Menjadi Rp 5.240.486.010,00.

Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 4.756.796.603,00,- atau 90,77%

Pagu Murni	Pagu Perubahan	Serapan	Capaian
Rp 4.957.639.051	Rp 5.240.486.010	Rp 4.756.796.603	90,77 %

Diharapkan LKj ini telah dapat mempersentasikan kinerja nyata kecamatan kintap sekaligus sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dapat memberikan informasi pengambilan keputusan pimpinan guna peningkatan kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Dasar Hukum.....	
D. Cascading Kinerja	
E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi	
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebelumnya	
I. Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Visi RPJMD.....	
B. Misi RPJMD	
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
F. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	
1.Sasaran RPJMD	
2. Eselon III	
2.1 Eselon IIIA (Camat)	
2.2 Eselon IIIB (Sekretaris Camat)	
3. Eselon IV	

3.1 Eselon IVA (Kepala Seksi)

3.2 Eselon IVB (Kepala Sub Bagian)

4. Perbandingan realisasi capaian strategis Kecamatan Kintap Tahun 2022 dan 2023
5. Laporan Pengukuran Kinerja Kecamatan Kintap Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023
6. Tabel rencana aksi dan reaksi kinerja kecamatan kintap triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2023

B. Akuntabilitas Keuangan 72

1. Anggaran dan realisasi APBD 2023
2. Anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program, kegiatan, dan sub kegiatan
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....

B. Strategi Peningkatan Kinerja.....

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU Kecamatan Kintap Tahun 2023
2. Pernyataan Hasil Reviu SAKIP Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja tahun 2023 bertandatangan
4. Pohon Kinerja Tahun 2023
5. Laporan Pengukuran Kinerja Kecamatan Kintap triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2023
6. Monev Rencana Strategis
7. Matrik Keselarasan Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kintap Tahun 2023, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Disamping itu Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kintap berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban instansi serta tekad seluruh PNS Kecamatan Kintap untuk mencapai Misi tujuan organisasi yang transparan guna mendukung tercapainya *Good Governance*. Selaras dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding Bangsa Melayani Bangsa, maka diharapkan ASN dan PTT di Lingkungan Kecamatan Kintap dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi Dasar penguatan budaya kerja guna mendukung pencapaian kinerja dan tujuan organisasi sesuai dengan Misi yang di emban Kecamatan Kintap.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2023 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.

- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kintap di masa yang akan datang

C. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum yang mendasari Kegiatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

D. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja Kecamatan Kintap Tahun 2023 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, Sasaran, dan Indikator Eselon III sampai dengan Eselon IV dengan rincian sebagai berikut :

1. Camat Kintap memiliki 1 (Satu) Tujuan Strategis dengan 1 (Satu) Indikator Tujuan.
2. Kecamatan Kintap memiliki 2 (dua) sasaran strategis Eselon III A dengan 2 (dua) indikator sasaran Eselon III
2. Kecamatan Kintap memiliki 5 (Lima) Sasaran Strategis Eselon IV A dengan 10 (Sepuluh) Indikator Sasaran Eselon IVA

3. Kecamatan Kintap memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Eselon IV b dengan **10 (Sepuluh)** Indikator Sasaran Eselon IVb.

Bagan Cascading Kinerja Sekretariat Daerah terlampir

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

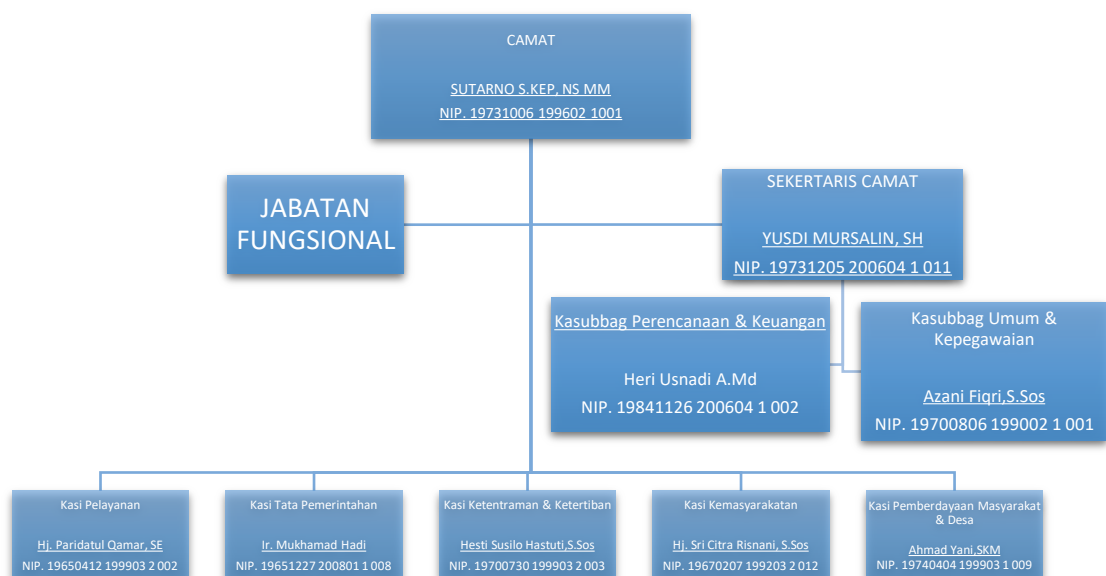
1. Peta Bisnis

Kecamatan Kintap Belum memiliki Proses Bisnis.

2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kintap sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 89) adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KINTAP TAHUN 2023



Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kintap adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan Kintap terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g. Seksi Kemasyarakatan
- h. Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan sifat kewilayahannya kecamatan memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja.
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
8. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan.
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemerliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
10. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, membina keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri.
11. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
12. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
14. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan.
15. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan.

16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan.
17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kintap memiliki unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Kintap dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan.
- b. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis.
- c. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan.
- d. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
- e. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan asset kecamatan.
- f. Menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga.

- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana.
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang dimaksud maka Sekretaris Kecamatan Kintap dibantu dengan 2 (dua) Sub Bagian, yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan.
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana startegis.
4. Menyiapkan bahan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan.

5. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran.
6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan.
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin.
10. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
11. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
12. Melaksanakan administrasi keuangan.
13. Melaksanakan urusan gaji pegawai.
14. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan.
15. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawaran dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi.
17. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

18. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
19. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai.
3. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai.
4. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
5. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan.
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai.
7. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian.

8. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
10. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol.
11. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
12. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
14. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.
15. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang.
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
17. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan.
- f. Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan.
- h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan.
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- k. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa.
- l. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
- m. Mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah.
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan.
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban.
- h. Menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan.
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan.

- j. Mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya.
- k. Melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan lainnya dan pajak restoran untuk PK 5.
- l. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya.
- m. Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat.
- n. Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1. Penanggulangan bencana
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 - 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 - 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan.
- p. Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung.
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah.
- r. Mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

- s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang).
- d. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- e. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian.
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan.

- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat.
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian.
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan.
- m. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- n. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan.
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat.

- c. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan.
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita.
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan.
- f. Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan.
- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya.
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi.
- k. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan.
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan.

- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan.
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan.
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan.
- f. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan.
- g. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan.
- h. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan.
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan.
- j. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan.
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan.

- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas lainnya.

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kintap

Sumber daya aparatur Kecamatan Kintap berdasarkan Pendidikan dan Golongan Ruang sebagai berikut :

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kintap sampai dengan Bulan Desember 2023 berjumlah 20 orang yang terdiri dari :

1. PNS : 11 orang
2. PTT : 9 orang

Jumlah PNS Kecamatan Kintap berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional yang ada di Kecamatan Kintap pada Tahun 2023 adalah :

1. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :
 - S-2 : 0 orang
 - S-1 : 10 orang
 - D-3 : 5 Orang
 - SLTA : 2 orang
 - SLTP : 3 orang
 - SD : 0 Orang
2. Berdasarkan Pangkat dan Golongan :
 - Pembina Tk. I (IV/b) : 0 Orang
 - Pembina (IV/A) : 1 orang
 - Penata Tk. I (III/d) : 6 orang
 - Penata (III/c) : - orang
 - Penata Muda Tk. I (III/b) : - orang
 - Penata Muda (III/a) : 1 orang
 - Pengatur Tk. I (II/d) : 1 orang

- Pengatur (II/c) : 1 orang
 - Pengatur Muda (II/b) : - orang
 - Pengatur Muda (II/a) : - orang
3. Berdasarkan Pejabat Struktural
- Eselon III/a : 1 orang
 - Eselon III/b : 1 orang
 - Eselon IV/a : 5 orang
 - Eselon IV/b : 2 orang
 - Staf Kecamatan : 2 orang
4. Berdasarkan Pejabat Fungsional
- Tidak ada

(table – Tabel masih dalam proses)

F. Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun , Kecamatan Kintap dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Untuk itu perlu diantisipasi yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* diperlukan penelaahan dan implementasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kintap yang merupakan unsur Staf.

Isu-isu Strategis pada kecamatan kintap antara lain sebagai berikut :

1. Konflik Agraria
2. Penciptaan Lapangan Kerja
3. Krisis Air Bersih

4. Penambahan Bangunan Infrastruktur Jalan
5. Berkurangnya Lahan Pertanian
6. Kurang Produktifnya Lahan Perikanan
7. Penurunan Stunting
8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Produk Layanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa kedudukan Kecamatan Kintap merupakan unsur Staf dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu Bupati antara lain dalam melaksanakan pelayanan administratif melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kintap.

Adapun jenis pelayanan sebagaimana maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
2. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
3. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
4. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
6. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
9. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

Berikut adalah Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan		Keterangan Pelaksana (2023)
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1.	Perekaman KTP	132 Orang	25 Orang	Seksi Pelayanan
2.	Penerbitan Kartu Keluarga	144 Lembar	- Lembar	Seksi Pelayanan
3.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	58 Surat	- Surat	Seksi Pelayanan
4.	Dispensasi Nikah	82 Surat	81 Surat	Seksi Kemasy
5.	Rekomendasi	8 Surat	56 Surat	Seksi Pelayanan
Legalisasi				
6.	Surat Keterangan Tidak Mampu	34 Surat	183 Surat	Seksi Pelayanan
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	33 Surat	188 Surat	Seksi Trantib
8.	Surat Keterangan Ahli Waris	56 Surat	59 Surat	Seksi Kemasy
9.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	43 Surat	- Surat	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Lain-lain	4 Surat	61 - Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Masuk	809 Surat	599 Surat	Seksi Pelayanan
12.	Surat Pengantar	45 Surat	-	Seksi Pelayanan
13.	Surat Keluar	626 Surat	828 Surat	Seksi Pelayanan
Fasilitasi				
14.	Penyaluran Bansos Provinsi	-	250 Paket	Seksi Kemasy.
15.	Penyaluran Bansos kabupaten (bantuan Kenaikan Inflasi)	-	478 UMKM dan 485 Orang (Dinsos)	Seksi Kemasy.
16.	Penyaluran Rastra / BPNT (12 Bulan)	630 KK	793 KK	Seksi Kemasy.
17.	S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana	-	4 Buah Desa Sungai Cuka	Seksi Kemasy.
18.	PKH (Program Keluarga Harapan)	-	- KK	Seksi Kemasy.
19.	PBI / JKN (Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional)	2157 KK	4632 KK	Seksi Kemasy.
20.	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	-	519 KK	Seksi Kemasy.
21.	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	8685 Jiwa	2155 Jiwa	Seksi Kemasy.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran Kecamatan Daerah Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM\	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2023	REALISASI ANGGARAN 2023	CAPAIAN (%)	SDM	KETERANGAN
1	Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien								
	Indikator : NILAI SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.592.958	Rp 4.437.600	96,62%	3 Orang	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.159.948	Rp 3.156.800	99,90%	3 Orang	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97%	3 Orang	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 3.154.898	Rp 2.916.200	92,43%	3 Orang	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.509.108	Rp 3.673.100	66,67%	3 Orang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyedia Bahan/Material	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%	3 Orang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 29.508.802	Rp 19.407.300	65,77%	3 Orang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 210.738.259	Rp 187.876.090	89,15%	3 Orang	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 80.564.588	Rp 71.678.000	88,97%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 44.019.479	Rp 37.415.330	85,00%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 220.163.508	Rp 219.676.536	99,78%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.000.000	Rp 28.470.700	98,17%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 37.000.000	Rp 36.426.990	98,45%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian

				Pemeliharaan Mebel	Rp 10.000.000	Rp 9.375.000	93,75%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.100.000	Rp 11.070.000	99,73%	3 Orang	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
2	Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat								
	Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan						
				koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 5.843.249	Rp 5.349.520	91,55%	3 Orang	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 69.888.464	Rp 53.670.000	76,79%	1 Orang	Seksi Tata Pemerintahan

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 2.291.918.497	Rp 2.189.293.070	95,52%	1 Orang	Seksi Keasyarakatan
				Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan Peraturan Perundan-Undangan	Rp 8.325.000	Rp 930.000	11,17%	1 Oranng	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimppinan di Kecamatan	Rp 70.353.725	Rp 64.233.045	91,30%	1 Orang	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 6.750.000	Rp -	0	1 Orang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 13.974.880	Rp 13.630.000	97,53%	1 Orang	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Rp 5.240.486.010	Rp 4.756.796.603	90,77%	-	-

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP sebelumnya





















Nomor	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
a.	Perencanaan Kinerja			
1)	Agar dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja, yaitu pada tujuan, sasaran, indikator dan target	telah dilaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja, yaitu pada tujuan, sasaran, indikator dan target	dalam proses penyelarasan	Link Google drive
2)	Agar melakukan pengadministrasian secara lengkap (hardcopy dan softcopy) terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja	pengadministrasian (hardcopy dan softcopy) terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan dengan rapi dan lengkap	selesai dilaksanakan	Link Google drive
3)	Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah selaras dipublikasi secara tepat waktu pada website SKPD atau website PPID	dokumen perencanaan kinerja yang telah selaras dipublikasi secara tepat waktu pada website SKPD atau website PPID	dalam proses penyelarasan	Link Google drive
4)	Terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diselaras agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	Evaluasi Berkala dilakukan per Triwulan	Sudah ditindaklanjuti	Link Google drive
b.	Pengukuran Kinerja			
5)	Agar melakukan Pengukuran kinerja secara berkala, berjenjang pada unit dibawahnya dan terdokumentasi, sehingga akan diketahui kendala kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan sebagai dasar acuan perbaikan kinerja	Telah dilakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang dalam pengukuran kinerja setiap triwulan	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
6)	Agar dapat menggunakan data kinerja yang andal, relevan dan valid / dapat ditelusuri sumber datanya untuk mengukur capaian kinerjanya	Data Kinerja disajikan dengan menyebutkan sumber datanya	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
c.	Pelaporan Kinerja			

7)	Agar dokumen laporan kinerja dilaporkan tepat waktu dan melakukan pengadministrasian secara lengkap (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>) terhadap dokumen pelaporan kinerja dan melakukan publikasi pada <i>website</i> SKPD atau <i>Website</i> PPID	dokumen laporan kinerja telah disusun dan akan dilaporkan tepat waktu dan melakukan pengadministrasian secara lengkap	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
8)	agar dalam penyusunan laporan kinerja memperhatikan standar penyusunan laporan kinerja sehingga laporan kinerja sesuai standar dan berkualitas	Dokumen laporan kinerja disusun sesuai standar	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
9)	Agar Laporan Kinerja menyajikan sekuruh informasi tentang capaian kinerja mulai dari :			
a.	Data capaian kinerja tahun bersangkutan pada setiap sasaran strategis	Data Capaian Kinerja tahun 2023	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
b.	Data Perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya selama periode renstra	Data Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
c.	Data yang menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten atau antar kecamatan.	Informasi analisis data evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten disiapkan	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
d.	Data yang menginformasikan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja	Informasi Efisiensi penggunaan Sumber daya dalam mencapai Kinerja disajikan dalam laporan kinerja	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
e.	Informasi keberhasilan / kegagalan, upaya nyata yang telah dilakukan dan upaya perbaikan kedepan pada setiap sasaran strategis	pembahasan dalam agenda Rapat Evaluasi Triwulan	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
10)	Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian pimpinan dan melakukan internalisasi terhadap seluruh pegawai untuk mendukung capaian kinerja melalui perubahan budaya kinerja organisasi.	Penyampaian Perkembangan sekaligus arahan dari pimpinan pada staf setiap apel senin pagi	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
d.	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal			

11)	Agar memperhatikan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi AKIP Internal SKPD, termasuk SDM yang memadai baik secara proporsi Tugas pokok fungsi Maupun Kompetensinya.	Evaluasi sumber daya yang diperlukan telah dilakukan	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive
12)	Agar Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang	Seluruh Rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP telah coba ditindaklanjuti dan dalam proses melengkapi bukti dukung	Dalam Proses melengkapi bukti dukung	Link Google drive

Beberapa Bukti dukung Tindak lanjut Laporrann Hasil Evaluasi AKIP

1. Website PPID SKPD

Print Excel PDF Column visibility						Search:
No	Judul Dokumen	Jenis	Kategori	Penerbit	Opsi	
1	Lokasi	Profil Badan Publik	Berkala	Kecamatan Kintap Tanggal : 08 Januari 2023	   	
2	Data Pejabat	Profil Badan Publik	Berkala	Kecamatan Kintap Tanggal : 07 Januari 2024	   	
3	PERBUP	Profil Badan Publik	Berkala	Kecamatan Kintap Tanggal : 06 Januari 2023	   	
4	Daftar Pegawai	Profil Badan Publik	Berkala	Kecamatan Kintap Tanggal : 05 Januari 2023	   	
5	SOTK	Profil Badan Publik	Berkala	Kecamatan Kintap Tanggal : 04 Januari 2023	   	

2. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan





3. Apel Arahkan Setiap Senin Pagi



I. Sistematika Penyajian

Sistematik Penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, proses bisnis, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Jangka Mengengah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Dalam visi pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut, maka visi Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018-2023 adalah:

TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI

Kata “**BERINTERAKSI**” pada visi diatas merupakan singkatan dari frase: “**Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi**”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA	Makna kata "Berkarya" lebih tinggi dari pada kata "bekerja", yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
INOVASI	Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
TERTATA	Tertib Administrasi dan Tertib substansi, artinya aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas, dengan demikian kualitas perencanaan di perangkat daerah, tertuama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditinggalkan secara berkesinambungan.
RELIGIUS	Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi supaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
AKTUAL	Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
SINERGI	Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi

yang ingin dicapai dengan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan.

Memperhatikan potensi, permasalahan, tantangan, kondisi serta peluang yang akan di hadapai pada masa yang akan datang dalam mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Kecamatan Kintap Mengacu kepada Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Periode 2018-2023 (*Halaman 391 RPJMD Kab. Tanah laut*) adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meingkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Meingkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

(Misi ke 1 , 3 dan 4 Pada RPJMD Kab. Tanah Laut)

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Rumusan Tujuan sebagaimana rencana strategis Kecamatan Kintap adalah sebagai berikut:

- 1 Terwujudnya kualitas pelayanan Publik di kecamatan.
- 2 Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik
- 3 Terwujudnya tata kelola adminstrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang dicapai pada masing-masing tujuan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3. meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kintap Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	85	87	88	89
Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	Nilai	72	75	81	82	83
				Nilai SAKIP	Nilai		50	55	60	65
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Presentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib	100 %	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk membantu keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah dalam melakukan penyelesaian masalah.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Kintap menentukan 1 (satu) indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada dikecamatan kintap.

LAMPIRAN XXX PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR :
 TANGGAL :

Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Kabupaten : Tanah Laut
 Nama SKPD : Kecamatan
 Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
 Fungsi :
 a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
 g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	1 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	Hasil Survey	Semua Seksi di Kecamatan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH. MH
 NIP.19750203 199903 2 006

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Untuk IKU Kecamatan Kintap Tahun 2023 Menargetkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 89.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) antara Pihak Pertama (Kepala SKPD/Camat) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dalam melaksanakan target tahunan yang cukup terinci.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (outcome, output). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (quantitative objective) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data

pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Untuk Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dalam hal ini Camat Kintap dapat dilihat dibawah ini :

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**
KECAMATAN KINTAP
Jl. A. Yani No. 67 Kintap Kode Pos 70883 Email : kintap.bersinergi@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUTARNO, S.Kep, Ns. MM
Jabatan : Camat Kintap
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : Bupati Tanah Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. SUKAMTA

Pihak Pertama,

SUTARNO, S.Kep, Ns. MM
NIP. 19731006 199602 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KINTAP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	89

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.752.906,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.969.075.545,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 168.017.910,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 247.836.028,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 70.800.000,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Rp 6.843.500,-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 2.470.588.553,-
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 20.724.880,-

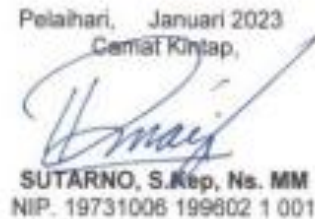
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 27.205.720,00
---	--	---	-------------------

Bupati Tanah Laut,



H. SUKAMTA

Pelaihari, Januari 2023
 Camat Kintap,



SUTARNO, S.Kep. Ns. MM
 NIP. 19731008 199802 1 001

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Eselon IIIB Sekretaris camat, Eselon IVA Kepala seksi, Eselon IVB Kasubbag, dan JFU / Pelaksana lingkup Kecamatan Kintap

(Data Terlampir).

Sasaran Kinerja, Indikator dan Target dari Eselon IIIB Sekretaris camat, Eselon IVA Kepala seksi, Eselon IVB Kasubbag, dan JFU / Pelaksana lingkup Kecamatan Kintap dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
ESELON 3 A CAMAT :		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	89
ESELON 3 B Sekretaris Kecamatan :		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Terwujudnya tata kelola administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP Nilai RB Terkelolanya administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	65 82 100 %
ESELON 4B Kasubbag Umum dan Kepegawaian		
Memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	12 Dokumen
Memfasilitasi dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	12 Dokumen
ESELON 4B Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :		
Memfasilitasi Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	4 Dokumen
Memfasilitasi Penyusunan laporan kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	7 Laporan
ESELON 4A Kasi Tata Pemerintahan :		
Memfasilitasi Pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	14 Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	7 Desa
Memfasilitasi Verifikasi data kependudukan Desa	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	14 Desa
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kali
ESELON 4A Kasi PMD :		
Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	3 Kelompok
Memfasilitasi Penyusunan Profil Kecamatan	Tersedianya profil kecamatan dengan baik	1 Dokumen
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat kecamatan	1 Kali
Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDESA).	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDESA) yang terbentuk, aktif dan bisa menghasilkan PAD	14 BumDesa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Memfasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	Jumlah kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	1 Kerjasama
Memfasilitasi penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	Jumlah penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	3 Kali
Kinerja Tambahan		
Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	14 Dokumen
ESELON 4A Kasi Kemasyarakatan :		
Memfasilitasi Pembinaan organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan dan keagamaan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan dan keagamaan	20 Kelompok
Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	10 Kegiatan
Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai)	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai)	630 Orang
ESELON 4A Kasi Trantib :		
Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan yang difasilitasi	15 Kali
Memfasilitasi kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	10 kelompok
Memfasilitasi Monitoring penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah Monitoring penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan	20 kali

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
ketertiban masyarakat di kecamatan		
Memfasilitasi sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	6 Kali
ESELON 4A Kasi Pelayanan :		
Memfasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	13 Pelayanan
Memfasilitasi pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	15 Pengaduan
Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1800 Dokumen

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana yang dijabarkan dalam Sasaran Strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut memerlukan dukungan anggaran yang dirincikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Belanja langsung untuk SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2023 dipergunakan untuk membiayai 4 (Empat) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.957.639.951,00.-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 5.240.486.010,00,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 4.756.796.603.00,- atau 90,77 %, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN APBD MURNI (Rp)	ANGGARAN APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI CAPAIAN 2023	CAPAIAN (%)	PERTANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	Rp 4.592.958	Rp 4.592.958	Rp 4.437.600	96,62%	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.159.948	Rp 3.159.948	Rp 3.156.800	99,90%	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.965.920.647	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97%	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 3.154.898	Rp 3.154.898	Rp 2.916.200	92,43%	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.509.108	Rp 5.509.108	Rp 3.673.100	66,67%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Penyedia Bahan/Material	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 29.508.802	Rp 29.508.802	Rp 19.407.300	65,77%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 130.000.000	Rp 210.738.259	Rp 187.876.090	89,15%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp -	Rp 80.564.588	Rp 71.678.000	88,97%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 44.019.479	Rp 44.019.479	Rp 37.415.330	85,00%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 201.816.549	Rp 220.163.508	Rp 219.676.536	99,78%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.000.000	Rp 29.000.000	Rp 28.470.700	98,17%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 37.000.000	Rp 37.000.000	Rp 36.426.990	98,45%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Mebel	Rp -	Rp 10.000.000	Rp 9.375.000	93,75%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 4.800.000	Rp 11.100.000	Rp 11.070.000	99,73%	Sub Bagian Uum dan Kepegawaian
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan						

			koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 5.843.249	Rp 5.843.249	Rp 5.349.520	91,55%	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 99.991.311	Rp 69.888.464	Rp 53.670.000	76,79%	Seksi Tata Pemerintahan

			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 2.291.918.497	Rp 2.291.918.497	Rp 2.189.293.070	95,52%	Seksi Keasyarakatan
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 8.325.000	Rp 8.325.000	Rp 930.000	11,17%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 70.353.725	Rp 70.353.725	Rp 64.233.045	91,30%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	Rp 6.750.000	Rp 6.750.000	Rp -	0	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 13.974.880	Rp 13.974.880	Rp 13.630.000	97,53%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Rp 4.957.639.051	Rp 5.240.486.010	Rp 4.756.796.603	90,77%	-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Kintap merupakan bentuk pertanggungjawaban selama Tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas sasaran - sasaran kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2023. Selain itu, realisasi keuangan yang digunakan untuk mencapai target kinerja Tahun 2023

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan instansi Pemerintah. Dimana Sasaran Kecamatan Kintap Tahun 2023 pada halaman 391 RPJMD Kab. Tanah laut 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.

(Misi ke 1 , 3 dan 4 Pada RPJMD Kab. Tanah Laut)

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kintap Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	85	87	88	89
Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	Nilai	72	75	81	82	83

				Nilai SAKIP	Nilai		50	55	60	65
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib	100 %	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2023, Capaian Kinerja Indikator sasaran kecamatan kintap dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	89	88,80	99,77 %	Camat
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	65	55,60	85,53 %	Sekretaris Camat
		Nilai RB	83	Nilai Belum	Nilai Belum	Sekretaris Camat
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%	Sekretaris Camat

1.1 Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Dengan tersedianya data penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat diharapkan hasilnya dapat bermanfaat sebagai :

1. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam upaya pemenuhan kinerja pelayanan.
2. Diketuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
4. Diketuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.
5. Diketuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan unit Kecamatan Kintap pada tahun sebelumnya.
7. Diketuinya Survey Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada unit kerja yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kintap dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan dengan responden menurut tugas dan fungsi Bagian tersebut, hasil Survey tersebut di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	89	88,80	99,77 %	Camat

1.2 Sasaran Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja : Nilai Sakip dan Nilai RB

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	65	55,60	85,53 %	Sekretaris Camat
		Nilai RB	83	Nilai Belum	Nilai Belum	Sekretaris Camat

1.3 Sasaran Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

Indikator : Meningkatnya Kualitas Layanan administrasi Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Penanggung Jawab
1..	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%	Sekretaris Camat

**PERBANDINGAN ANTARA INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KABUPATEN/RPJMD DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) KECAMATAN KINTAP TAHUN 2023**

2. Eselon III

Dari target Indikator Kinerja Utama Eselon III (Camat dan Sekretaris Camat)) yang telah selaras dengan Sasaran RPJMD, maka uraian dan analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Renstra	Indikator kinerja Utama	Target Kinerja 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
	Meningkatnya kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	89	88,80	99,77 %
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	65	55,60	85,53 %
		Nilai RB	83	Nilai Belum	Nilai Belum
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan admnistrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%

2.1 Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat

Indikator : Indek Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja	Realisasi 2023	Capaian 2023	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	89	88,80	99,77 %	Camat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memberikan amanat kepada seluruh penyelenggara pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi

komponen standar pelayanan. Sebuah instansi dalam pelayanan publik sangat tergantung dengan sejauh mana sumber daya manusia yang terdapat dalam instansi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan organisasi dalam memberikan pelayanan prima kepada publik. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai penyelenggara pelayanan publik terus berupaya mengikuti perkembangan dan berupaya selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kintap					
2022			2023		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
88	86,26	98,04 %	89	88,80	99,77 %

3. Eselon IV

Eselon IV di Kecamatan Kintap terdiri dari 5 (Lima) Orang Kepala Seksi, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Kemasyarakatan, kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban dan Kepala Seksi Pelayanan. Dan 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

3.1 Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 1 (Satu) Program Yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah , Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Pagu Anggaran Rp 69.888.464,- Terealisasi Sebesar Rp 53.670.000 (76,79%)

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022

Seksi Tata Pemerintahan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TA 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	

Kasi Tata Pemerintahan :						
Pelayanan publik Seksi Tata Pemerintahan						
	Memfasilitasi Pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	14 Desa	11 Desa	78,57 %	11 Desa
	Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	7 Desa	3 Desa	42,85 %	4 Desa
	Menfasilitasi Verifikasi data kependudukan Desa	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	14 Desa	11 Desa	78,57%	11 Desa
	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kali	1 Kali	100 %	1 Kali

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi belum mempunyai staf sehingga kinerja di Seksi Tata Pemerintahan menjadi belum maksimal.

Berikut adalah Tabel Realisasi dan Pecapaian Target Kinerja Serta kendala dan Saran

Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2023 :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			
1	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	14 Desa	3 Desa	4 Desa	3 Desa	1 Desa	Ego Aparatur Pemerintahan Desa Tinggi, sering merasa tahu apabila diberi masukan dari pihak lain	Evaluasi Penempatan Aparatur desa dan pembinaan dan bimbingan rutin untuk aparatur desa (Desa salaman, Muara kintap dan Sungai Cuka)	11 Desa
2	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjangkaran aparat desa dan BPD	7 Desa	4 Desa				Dengan adanya perubahan sistem pembagian wilayah (Dusun) dan keterwakilan perempuan sudah mengalami peningkatan perbaikan dibandingkan pemilihan sebelumnya (Penunjukan)	Pertahankan sistem penjangkaran yang sdh ada	4 Desa
3	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	14 Desa	3 Desa	3 Desa	3 Desa	2 Desa		Desa Muara Kintap, Desa Salaman dan Desa Kintapura kurang akurat dan lambat dalam verifikasi data	11 Desa
4	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 kali			1 Kali		Tidak ada		

3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi PMD dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan yaitu Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan pagu sebesar Rp 600.000 terealisasi sebesar Rp 600.000 (100%). pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kecamatan Jorong (Jorong, Batu Ampar dan Kintap).

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di kecamatan kintap hanya diisi oleh 1 (satu) orang Kasi dan tidak memiliki staf yang membantu.

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2023 dan 2022

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TA 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi PMD :						
Pelayanan publik Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Memfasilitasi kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	3 Kelompok	3 Kelompok	100 %	5 Kelompok
	Memfasilitasi Penyusunan profil Kecamatan	Tersedianya profil kecamatan berhasil menyusun profil desa dengan baik	1 Dokumen	-	-	Tidak terealisasi

	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat kecamatan	1 Kali	1 kali	100%	1 Kali
	Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDESA)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDESA) yang terbentuk, aktif dan bisa menghasilkan PAD	14 BumDesa	6 Bumdesa	50 %	8 Bumdesa
	Memfasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	Jumlah kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	1 Kerjasama	-	-	Tidak Terealisasi
	Memfasilitasi penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	Jumlah penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	3 Kali	3 kali	100 %	1 Kali
	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %	14 Dokumen

Kinerja Utama Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa diantaranya :

1. Memfasilitasi kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya, dari target 4 kelompok dapat direalisasikan sebanyak 5 kelompok.
Pada tahun 2021 tidak dapat terealisasi karena wabah Covid 19.
2. Memfasilitasi Penyusunan profil desa, dari Target 14 desa yang profil desanya tersusun dengan baik, terealisasi 11 Desa
3. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan, pada tahun 2022 dilaksanakan 1 kali pada triwulan pertama
4. Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDESA), dari target 14 BumDesa yang terbentuk, terealisasi 7 Bumdesa

5. Memfasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa, terealisasi 1 kerjasama BumDesMa
6. Memfasilitasi penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan, dari target 3 kali, dapat direalisasikan sebanyak 2 kali
7. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa, tercapai target 100 % dari 14 Dokumen (14 Desa).

Dalam melaksanakan Tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki kendala sebagai berikut :

1. Kegiatan Musrenbang kecamatan, pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kec Batu Ampar (Jorong, Batu Ampar dan Kintap) menyebabkan pelaksanaan tidak efektif, karena 3 kecamatan di gabung menjadi 1 pada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan akan lebih Efektif apabila dilaksanakan di masing masing Kecamatan.
2. Pada Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan, informasi kegiatan yang disetujui dan dilaksanakan pada tahun berjalan belum ada, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih usulan. Informasi Kegiatan yang telah disetujui di Tahun berjalan sangat penting diinformasikan Saat Musrenbang, agar tidak di usulkan Kembali ke tahun berikutnya.
3. Perlunya sinkronisasi dan pemetaan dari para stakeholder dalam optimasi penggunaan dana desa.

Berikut adalah Tabel Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Serta kendala dan Saran
 Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (dijabarkan)				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			
1	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	4 Kelompok				3 Kelompok	belum adanya forum koordinasi antar kelompok ditingkat kecamatan	Perlu adanya Forum Koordinasi antar kelompok ditingkat kecamatan	3 Kelompok
2	Memfasilitasi Penyusunan profil Kecamatan	1 Dokumen					Sinkronisasi data pada tiap tiap desa belum bisa dilakukan	Penghimpun data lebih aktif dalam mengumpulkan perubahan data	-
3	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrembang tingkat kecamatan	1 kali	1 Kali				informasi kegiatan yang disetujui dan dilaksanakan pada tahun berjalan belum ada	Informasi Kegiatan yang telah disetujui di Tahun berjalan sangat penting diinformasikan Saat Musrenbang, agar tidak di usulkan Kembali ke tahun berikutnya	1 Kali
4	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDESA) yang terbentuk, aktif dan bisa menghasilkan PAD	14 BumDESA	2	2	2	2	Kurang Aktifnya Pengurus dan belum optimalnya BumDESA	Perlu adanya Forum koordinasi BumDESA di Tingkat Kecamatan	8 BumDESA
5	Jumlah kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	1 Kerjasama							-
6	Jumlah penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	3 Kali		1	1	1			3 Kali

7	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	14 Dokumen	3	4	3	4		14 Dokumen
---	--	------------	---	---	---	---	--	------------

3.3 Kepala Seksi Kemasyarakatan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) sub kegiatan yakni Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal dengan nilai pagu Rp 2.291.918.497,- terserap sebesar Rp 2.189.293.070, 00 (95,52%). Sub Kegiatan ini melaksanakan beberapa kegiatan lapangan diantaranya Safari Ramadhan, Kegiatan Seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Pembinaan PKK, dan Pemberian Dana Hibah 1 Miliar untuk Kelompok Masyarakat.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022

Seksi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TA 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Kemasy :						
Pelayanan publik Seksi Kemasyarakatan						

	Memfasilitasi Pembinaan organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan dan keagamaan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan dan keagamaan	20 Kelompok	16 Kelompok	100 %	20 Kelompok
	Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	10 Kegiatan	30 Kegiatan	80 %	8 Kegiatan
	Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai)	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai)	639 Orang	630 Orang	99,12 %	793 Orang

Pada Tahun 2023, Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan dan keagamaan 16 Kelompok, ada penurunan 4 kelompok dari tahun 2022. Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP ada 30 kegiatan dari target 10 kegiatan, meningkat 22 kegiatan dari tahun 2022. Peningkatan disebabkan antusiasme kelompok untuk melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana mandiri.

Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai) pada tahun 2023 sebanyak 630 orang, kurang dari target 9 orang karena 9 orang tersebut pindah domisili dan meninggal dunia.

Pada tahun 2023, penerima BPNT turun dari 793 orang ditahun 2022 menjadi 639 Orang ditahun 2023. Hal ini disebabkan Kuota dari Pemerintah Pusat untuk kecamatan kintap diturunkan.

Berikut adalah Tabel Realisasi dan Pecapaian Target Kinerja Serta kendala dan Saran Seksi Kemasyarakatan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (dijabarkan)				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			
1	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan dan keagamaan	20 Kelompok	Pokdarwis Desa Mekarsari, MWC NU cabang Kintap, Yayasan Al Hasyimiah	Karang Taruna Satrian Bina Muda Desa kebun Raya, Yayasan nurul iman, Kelompok Kesenian karawitan Mulio Laras	Karang Taruna Taruna Jaya Desa Kintapura, PAC GP Anshor,	Karang Taruna Samudra Jaya Muara Kintap	Tidak aktif nya Pengurus Karang Taruna di Beberapa Desa (Desa Pandansari, Salaman, Riam Adungan, Sebamban Baru, Sungai Cuka, Sumber Jaya)	Perlunya dilaksanakan pembinaan berlanjut untuk Temu kader karang taruna (jambore) untuk meningkatkan semangat karang taruna desa yang belum aktif	16 Kelompok
			Lembaga Adat Bandesa Desa Sebamban Baru	Karang Taruna Satria Budi Tama Desa Bukit Mulya	Karang Taruna Desa MeKar Sari	Majelis Ta'lim Perempuan Miftahul Khair Desa kintapura	Belum ada prioritas anggaran untuk pembinaan Majelis Ta'lim	Perlunya tambahan anggaran untuk pembinaan majelis Ta'lim	
						Majelis Ta'lim Az Zahra Desa Kintapura	Kurang konsultasi dan komunikasi ke Pemerintah Kecamatan sehingga informasi yang didapat tidak sepenuhnya.		
2	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	10 kegiatan	Organisasi Keagamaan : Lptq, Bkprmi, Pac Gp Anshor, Mwc Nu, Yayasan Nurussalam, Yayasan Miftahul Ulum, Yayasan Al Hasyimiah, Majelis Talim Miftahul Khair, Yayasan Muhajirin Desa Sebamban Baru Dll, Terlampir				Kurang nya motivasi Pengurus lembaga karena kesibukan pekerjaan dan banyaknya tugas rangkap	Pemerintah Desa untuk lebih merangkul dan memberikan semangat kepada organisasi / lembaga untuk lebih bersemangat	30 Kegiatan
3	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial (BPNT, Bantuan Pangan Non tunai)	639 Orang	630 Orang	630 Orang	630 Orang	630 Orang	Adanya Perubahan Data Jumlah Penerima karena : Meninggal Dunia, Pindah Alamat ke Kecamatan lain, dan sudah mampu)	Sinkronisasi Data dan Koordinasi dengan Dinas Teknis Terkait lebih ditingkatkan	793 Orang

Pada Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Kecamatan Kintap menghibahkan Dana kegiatan Kepada 8 (Delapan) Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan terealisasi 100 %

Berikut adalah Tabel 8 (Delapan) Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan yang menerima Hibah pada Tahun 2023 :

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA	ALAMAT / DESA	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH
1	Tablik Akbar/NGAJI KEBANGSAAN	PAC. GP ANSOR	Jl. Ayani. Muara Kintap Kecamatan Kintap	2 Juli 2023	Rp 70.000.000
2	Harlah dan tablik Akbar Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kintap	MWC NU Kintap	Desa Kintap Kecil Kec Kintap	10 Okt 2023	Rp 60.300.000
3	Festival Kapal Nelayan dan Selamatan Laut	Karang Taruna Samudra Jaya	Desa Muara Kintap /Kecamatan Kintap	2 Juli 2023	Rp 150.000.000
4	Event Wisata Lobsari	Pokdarwis Desa Mekarsari	Desa Mekarsari /Kec Kintap	13 Agustus 2023	Rp 80.000.000
5	Perlombaan Memancing Udang dan LombaCipta Menu berbahan Dasar serba Udang Dalam Rangka HUT RI ke 78	KT Taruna Jaya	Desa Kintapura /Kec Kintap	16-Sep-23	Rp 80.000.000
6	Haul Akbar Syeh Seman	Al Hasyimiyah	Desa Pasir Putih Kec Kintap	15 Maret 2023	Rp 100.400.000
7	Kompetensi Seni Islam TKA DAN TPA & TQA	Yayasan Nurul Iman	Desa Sungai Cuka	27 Agustus 2023	Rp 100.870.000
8	Pagelaran Wayang Kulit	Kelompok Kesenian Karawitan MULYO LARAS	Desa Bukit Mulia /Kec Kintap	2 Desember 2023	Rp 200.970.000
TOTAL DANA HIBAH YANG DISERAP					Rp 842.540.000

Berikut beberapa Foto Kegiatan dari Penggunaan dana hibah tersebut.

1. Pelaksanaan Kegiatan Event Wisata Lobsari oleh Kelompok Pokdarwis Desa Mekarsari Dengan Nilai Rp 80.000.000

2. Pelaksanaan Kegiatan Festival Kapal Nelayan dan Selamatan Laut oleh Karang Taruna Samudra Jaya Desa Muara Kintap dengan Nilai Hibah Rp 150.000.000



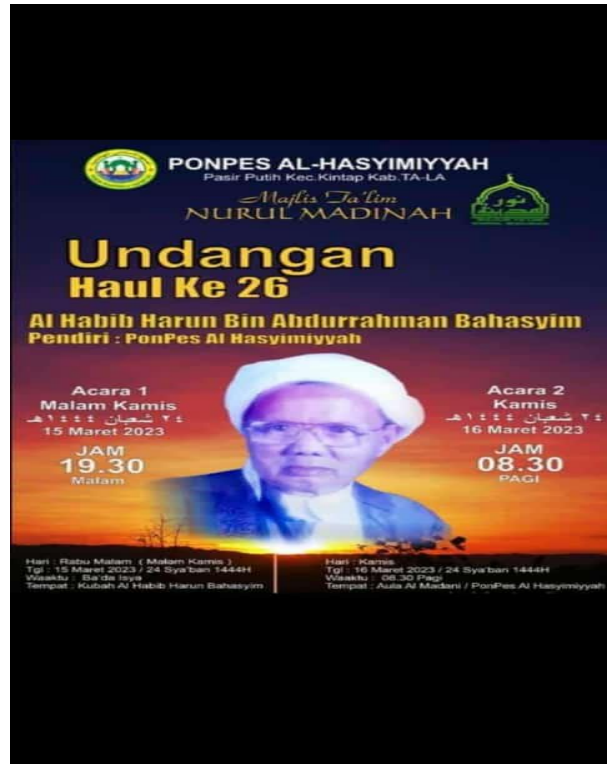




3. Kegiatan Harlah Tabligh Akbar Majelis Wakil Cabang NU Kintap dengan Nilai Hibah 60.300.000



4. Pelaksanaan Kegiatan Haul Akbar Syekh Seman Oleh Yayasan Al Hasyimiyah
Desa Pasir Putih dengan Hibah Rp 100.440.000



5. Pelaksanaan Kegiatan Kompetensai Seni Islam TKA/TPA & TQA OLEH Yayasan

Nurul Iman Desa Sungai Cuka dengan Nilai Hibah Rp 100.870.000



6. Pelaksanaan Pegelaran Wayang Kulit Oleh Kelompok Kesenian Karawitan Mulyo
- Laras Desa Bukit Mulia dengan Nilai Hibah Rp 200.970.000



7. Kegiatan Perlombaan memancing udang dan Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar serta Udang (KT Taruna Jaya) Desa Kintapura dengan Dana Hibah Rp.80.000.000







8. Kegiatan Tablik Akbar/Ngaji Kebangsaan oleh PAC GERAKAN PEMUDA ANSOR dengan hibah Rp.70.000.000



Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi kemasyarakatan masih mengalami kesulitan, tidak adanya staf yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi didalam melaksanakan tugas dan jangkauan daerah yang akses jalannya masih sulit untuk dilewati.

3.4 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kasi Trantib Tahun 2023 melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) sub kegiatan yakni Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan Penanganan Konflik sosial sesuai perundang-undangan dan sub kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan ditingkat Kecamatan.

Pagu Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap Tahun 2023 pada sub kegiatan Penanganan Konflik sosial sesuai perundang-undangan sebesar Rp 8.325.000 Terserap sebesar Rp 930.000 (11,17 %). Sedangkan Sub kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan ditingkat Kecamatan sebesar Rp 70,353.725 Terserap sebesar Rp 62.233.045 (91,30 %).

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TA 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Trantib :						
Pelayanan publik Seksi Ketentraman dan Ketertiban						

	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan yang difasilitasi	20 kali	13 Kali	65 %	13 kali
	Memfasilitasi kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	14 Kelompok	8 Kelompok	57,14 %	8 Kelompok
	Memfasilitasi Monitoring penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah Monitoring penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan	20 Kali	16 Kali	80 %	16 Kali
	Memfasilitasi sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	6 Kali	6 Kali	100 %	6 Kali

Pada Tahun 2023, Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan yang difasilitasi sebanyak 13 Kali dari Target 20 Kali. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif terealisasi 8 kelompok dari target 14 kelompok. Jumlah Monitoring penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan dapat dilaksanakan 16 kali dari target 20 kali dan Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan dapat terealisasi 100 % sebanyak 6 kali.

Kendala Dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah belum memiliki staf yang membantu dalam melaksanakan Tugas dan kegiatan sehingga beberapa kegiatan yang dilaksanakan menjadi belum maksimal.

Berikut adalah Tabel Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Serta kendala dan Saran Seksi Keamanan dan Ketertiban Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4			
1	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban dikecamatan yang difasilitasi	20 kali	4	3	4	2 Kali	Tidak ada staf dan peralatan kerja yang memadai	Perlu nya tambahan Peralatan Kerja (Laptop) dan Staf Pembantu	13
2	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	14 Kelompok	2	2	2	2	Perlu Kegiatan Pelatihan dan jambore Linmas	Perlu diadakan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Jambore linmas berkelanjutan	8
3	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	20 Kali	4	4	4	4	Tidak ada staf dan peralatan kerja yang memadai	Perlu nya tambahan Peralatan Kerja (Laptop) dan Staf Pembantu	16
4	jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	6 Kali	2	1	1	2	Tidak ada staf dan peralatan kerja yang memadai	Perlu nya tambahan Peralatan Kerja (Laptop) dan Staf Pembantu	6

Beberapa Dokumentasi dari Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban :





3.5. Kepala Seksi Pelayanan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan yaitu kegiatan Implementasi Pelaksanaan *Good Governance*. Adapun untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dan 2 dapat tercapai sebesar 100%.

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2023 dan 2022

Seksi Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TA 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Pelayanan :						
	Pelayanan publik Seksi Pelayanan Kecamatan					
	Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu di kecamatan	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) Sesuai SOP	13 Jenis Pelayanan	13 Jenis Pelayanan	100%	13 Jenis Pelayanan
	Memfasilitasi Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi	15 Pengaduan	12 Pengaduan	80 %	12 Pengaduan
	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1800 Dokumen	2103 Dokumen	117 %	1880 Dokumen

Pada Tahun 2023, Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) Sesuai SOP sebanyak 13 Layanan. Pelayanan Pengurusan IMB yang semula menjadi kewenangan Kecamatan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Jumlah Pengaduan Masyarakat yang difasilitasi sebanyak 12 Pengaduan dan Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 2103 Dokumen.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap Tahun 2023 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Kintap pada Tahun 2023 memperoleh IKM sebesar 88,80 belum mencapai target dari yang ditetapkan 89.

Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama tahun 2023 di Kecamatan Kintap, terdiri dari :

1. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
2. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
3. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
4. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
5. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
8. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
9. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
10. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
13. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

Berikut adalah Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan		Keterangan Pelaksana (2023)
		Tahun 2023	Tahun 2022	
1.	Perekaman KTP	132 Orang	25 Orang	Seksi Pelayanan
2.	Penerbitan Kartu Keluarga	144 Lembar	- Lembar	Seksi Pelayanan
3.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	58 Surat	- Surat	Seksi Pelayanan
4.	Dispensasi Nikah	82 Surat	81 Surat	Seksi Kemasy
5.	Rekomendasi	8 Surat	56 Surat	Seksi Pelayanan
Legalisasi				
6.	Surat Keterangan Tidak Mampu	34 Surat	183 Surat	Seksi Pelayanan
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	33 Surat	188 Surat	Seksi Trantib
8.	Surat Keterangan Ahli Waris	56 Surat	59 Surat	Seksi Kemasy
9.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	43 Surat	- Surat	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Lain-lain	4 Surat	61 - Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Masuk	809 Surat	599 Surat	Seksi Pelayanan
12.	Surat Pengantar	45 Surat	-	Seksi Pelayanan
13.	Surat Keluar	626 Surat	828 Surat	Seksi Pelayanan
Fasilitasi				
14.	Penyaluran Bansos Provinsi	-	250 Paket	Seksi Kemasy.
15.	Penyaluran Bansos kabupaten (bantuan Kenaikan Inflasi)	-	478 UMKM dan 485 Orang (Dinsos)	Seksi Kemasy.
16.	Penyaluran Rastra / BPNT (12 Bulan)	630 KK	793 KK	Seksi Kemasy.
17.	S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana	-	4 Buah Desa Sungai Cuka	Seksi Kemasy.
18.	PKH (Program Keluarga Harapan)	-	- KK	Seksi Kemasy.
19.	PBI / JKN (Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional)	2157 KK	4632 KK	Seksi Kemasy.
20.	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	-	519 KK	Seksi Kemasy.
21.	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	8685 Jiwa	2155 Jiwa	Seksi Kemasy.
22.	Bantuan Pangan Nasional	1076 Orang	-	Seksi Kemasy.

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Kintap

Volume/Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kintap. Sedangkan untuk Fasilitasi, Kecamatan Kintap hanya membantu dalam penyaluran bantuan barang maupun dana dari Dinas / Instansi terkait maupun pemangku kepentingan.

Selain dari pelayanan yang disampaikan diatas, ada lagi bentuk pelayanan yang diberikan oleh kantor kecamatan kintap tetapi tidak masuk dalam register seperti Pelayanan Isolasi Mandiri Covid 19, yang ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Satgas Kecamatan.

3.6 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan 2022

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI TA 2022
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasubbag Perencanaan dan keuangan						
Penyusunan Program Perencanaan, keuangan dan Pelaporan	Memfasilitasi Penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	5 Dokumen

	Memfasilitasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 laporan	7 Laporan	100%	7 laporan
--	---	---	-----------	-----------	------	-----------

Untuk mencapai Target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mendapat kendala serta memberikan masukan masukan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	4 Dokumen	2	2		1	Waktu Penginputan SIPD yang sangat dibatasi	Perpanjangan Waktu Inputan di SIPD	5
2	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	7 Laporan	1	1	2	3	Adanya 2 Aplikasi FMIS dan SIPD membuat Laporan Keuangan sedikit melambat	Dibikin Konektivitas antar aplikasi	7

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis kedua, SKPD Kecamatan Kintap melaksanakan melaksanakan 1 (Satu) Program yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pada Tahun 2023, Sub Bagian Perencanaan dan keuangan melaksanakan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan.

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Yang Pertama adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 4.592.958 terealisasi Rp 4.437.600 (96,62 %).

Sub Kegiatan Yang kedua Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Pagu sebesar Rp 3.159.948 terealisasi Rp 3.156.800 (99,90%).

Sub Kegiatan yang ketiga Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Sebesar Rp 2.072.920.647 terealisasi Rp 1.782.111.322 (85,97 %).

Sub Kegiatan yang keempat Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD dengan pagu Rp 3.154.898 terealisasi Rp 2.916.200 (92,43%)

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki 3 (empat) orang SDM, dipimpin oleh 1 orang Kasubbag, 1 Orang Bendahara Pengeluaran, serta 1 Orang staf PTT untuk membantu.

Selain Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada urusan perencanaan dan keuangan, sub bagian perencanaan dan keuangan juga melaksanakan tugas pelaporan seperti, Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keuangan (CaLK) dan beberapa laporan lain yang dibebankan oleh pimpinan.

Selain Tugas Pokok diatas, Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan juga melaksanakan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan lainnya yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan dan Sub Kegiatan koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Pagu Rp 5.843. 249 terealisasi Rp 5.349.520 (91,55%)

Berikut adalah Tabel Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

Kegiatan	Sub Kegiatan		APBD Perubahan	Serapan	Persen tase
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA					

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok	Rp 4.592.958	Rp 4.437.600	96,62 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	Rp 3.159.948	Rp 3.156.800	99,90%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang /Bulan	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19 Dok	Rp 3.154.898	Rp 2.916.200	92,43%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK					
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan					
	koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen	Rp 5.843. 249	Rp 5.349.520	91,55 %

3.7 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ketiga, SKPD Kecamatan Kintap melaksanakan 1 (satu) program, 4 (empat) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan yang di ampu oleh sub bagian Umum dan Kepegawaian.

Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan 2022

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			REALISASI TA 2021
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasubbag Umum dan Kepegawaian						

	Memfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	11 Dokumen	11 Dokumen	100 %	11Dokumen
	Memfasilitasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	16 Buah	14 Buah	87,5%	16 Buah
	Memfasilitasi dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	11 Dokumen

Untuk mencapai Target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian mendapat kendala serta memberikan masukan masukan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Kendala Yang dihadapi	Masukan dan Saran untuk perbaikan	Capaian Kinerja
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4			
1	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	11 Dokumen	11	11	11	11	Anggaran sangat minim sehingga pelayanan belum maksimal	Penambahan Anggran untuk kesekretariatan	11
2	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	16 Buah	3	4	3	4	Ada sarana dan yang rusak berat tidak bisa diperbaiki	Diusulkan untuk penghapusan asset	14
3	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	11 Dokumen	3	3	3	2	Pegawai Kurang disiplin melengkapi persyaratan	Himbauan kepada pegawai untuk lebih disiplin dalam melengkapi persyaratan	11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan Pemeliharaan barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Berikut adalah Tabel Realisasi Serapan Anggaran Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
2023				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.509.108	Rp 3.673.100	66,67%
	Penyediaan Bahan/Material	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 29.508.802	Rp 19.407.300	65,77%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 210.738.259	Rp 187.876.090	89,15%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 80.564.588	Rp 71.678.000	88,97%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 44.019.479	Rp 37.415.330	85,00%

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 220.163.508	Rp 219.676.536	99,78%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.000.000	Rp 28.470.700	98,17%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 37.000.000	Rp 36.426.990	98,45%
	Pemeliharaan Mebel	Rp 10.000.000	Rp 9.375.000	93,75%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.100.000	Rp 11.070.000	99,73%

Dalam Melaksanakan Tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki 3 (Tiga) orang SDM, dipimpin oleh 1 orang Kasubbag, 1 Pengurus Barang, serta 1 Orang staf PTT untuk membantu.

4. Perbandingan Realisasi Capaian Strategis Kecamatan Kintap tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap					
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2022			2023		
88	86,28	98,04 %	89	88,80	99,77 %

Tabel Perbandingan Realiasi Capaian Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Renstra	Indikator kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)	Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
			2023			2022		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	89	88,80	99,77 %	88	86,28	98,04 %
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	65	Nilai Belum	Nilai Belum	60	55,60	92,66 %
		Nilai RB	83	Nilai Belum	Nilai Belum	82	89,86	109,6 %
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %

5. Laporan Pengukuran Kinerja Kecamatan Kintap Triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV 2023

**Tabel Pengukuran Kinerja Triwulan 1,2,3 dan 4
SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2023**

	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Pagu Validasi	Rincian	Realisasi	Serapan Triwulan 1	Serapan Triwulan 2	Serapan Triwulan 3	Serapan Triwulan 4	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
	7.01 KECAMATAN									
	06.00 Kantor Kecamatan Kintap									
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	<u>7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</u>	4.592.958	4.592.958	4.592.958	4.437.600	1.669.400	498.400	1.744.800	525.000	96,62%
	<u>7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>	3.159.948	3.159.948	3.159.948	3.156.800	0	979.200	0	2.177.600	99,90%
	01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	<u>7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</u>	2.072.920.647	2.072.920.647	2.072.920.647	1.782.111.322	386.910.248	406.572.900	569.738.730	418.889.444	85,97%

	<u>7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</u>	3.154.898	3.154.898	3.154.898	2.916.200	1.023.600	500.000	905.600	487.000	92,43%
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	<u>7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</u>	5.509.108	5.509.108	5.509.108	3.673.100	2.030.000	0	1.643.100	-	66,67%
	<u>7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</u>	29.508.802	29.508.802	29.508.802	19.407.300	2.492.000	3.634.350	5.451.450	7.829.500	65,77%
	<u>7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	100,00%
	<u>7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</u>	210.738.259	210.738.259	210.738.259	187.876.090	67.295.917	11.637.500	19.015.000	89.927.673	89,15%
11.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	<u>7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	80.564.588	80.564.588	80.564.588	71.678.000	0	0	0	71.678.000	88,97%
11.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	<u>7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	100,00%
	<u>7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</u>	44.019.479	44.019.479	44.019.479	37.415.330	4.301.576	7.535.506	8.404.604	17.173.644	85,00%
	<u>7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</u>	220.163.508	220.163.508	220.163.508	219.676.536	36.397.296	54.688.284	70.320.252	58.270.704	99,78%
11.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

<input type="checkbox"/>	<u>7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</u>	29.000.000	29.000.000	29.000.000	28.470.700	4.910.700	4.680.000	10.830.000	8.050.000	98,17%
<input type="checkbox"/>	<u>7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</u>	37.000.000	37.000.000	37.000.000	36.426.990	4.070.000	18.746.990	6.450.000	7.160.000	98,45%
<input type="checkbox"/>	<u>7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.375.000	0	0	0	9.375.000	93,75%
<input type="checkbox"/>	<u>7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.070.000	0	1.120.000	0	9.950.000	99,73%
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
<input type="checkbox"/>	02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									
<input type="checkbox"/>	<u>7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</u>	5.843.249	5.843.249	5.843.249	5.349.520	0	5.349.520	0	-	91,55%
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										
<input type="checkbox"/>	05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									

<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	69.888.464	69.888.464	69.888.464	53.670.000	0	34.060.000	7.260.000	12.350.000	76,79%
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.291.918.497	2.291.918.497	2.291.918.497	2.189.293.070	0	554.863.200	1.156.740.600	477.689.270	95,52%
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.325.000	8.325.000	8.325.000	930.000	0	405.000	375.000	150.000	11,17%
<input type="checkbox"/>	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	70.353.725	70.353.725	70.353.725	64.233.045	0	28.140.448	7.725.000	28.367.597	91,30%
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										
<input type="checkbox"/>	06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
<input type="checkbox"/>	7.01.06.2.01.03 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.750.000	6.750.000	6.750.000	-	0	0	0	-	0,00%
<input type="checkbox"/>	7.01.06.2.01.09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.974.880	13.974.880	13.974.880	13.630.000	13.630.000	0	0	-	97,53%

	Total		5.240.486.010		4.756.796.603	524.730.737	1.134.411.298	1.866.604.136	1.231.050.432	90,77%
						10,01%	21,65%	35,62%	23,49%	90,77%
						Serapan TW 1	Serapan TW 2	Serapan TW 3	Serapan TW 4	

Pada Triwulan 1, Serapan Anggaran sebesar Rp 524.730.737 dengan capaian 10,01 %

Pada Triwulan 2, Serapan Anggaran sebesar Rp 1.134.411.298 dengan capaian 21,65 %.

Pada Triwulan 3, Serapan Anggaran sebesar Rp 1.866.604.136 dengan capaian 35,52 %.

Pada Triwulan 4, Serapan Anggaran sebesar Rp 1.231.050.432 dengan capaian 23,49 %.

Capaian Kinerja pada akhir triwulan ke 4 dengan Capaian 90,77 %

6. Tabel Rencana Aksi dan reaksi Kinerja Kecamatan Kintap Triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN KINTAP

Jl. A. Yani No. 07 Kintap Kode Pos 70883 Email :
 kintap.bersinergi@gmail.com

RENCANA AKSI MONITORING DAN EVALUASI/PENGUKURAN KINERJA INTERNAL SECARA BERKALA

Nama OPD	Kantor Kecamatan Kintap
Kepala OPD	Sutarno S.Kep, Ns.MM
Tahun Pelaksanaan	2023

No	Jabatan	Tugas dan Fungsi (Salin dari Perda Tusi)	Indikator Kinerja Utama (Renstra/Renja)	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Target Tahun 2023	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Realisasi Akhir 2023	Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Camat		Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan (indeks kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	89	87,43		89,12		88,44		88,9		88,8	Camat

1.a	Kepala Seksi Tata Pemerintahan		Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	Fasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD	14 Desa	4	3	3	3	4	3	4	3	12 Desa	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
			Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	Fasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	4 Desa	0	0	0	0	4	4	0	0	4 Desa	
			Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	Monitoring penyusunan laporan kependudukan	14 Desa	4	3	3	3	4	3	4	3	12 Desa	
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	1 Kali	0	0	0	0	1	1	0	0	1 Kali	
1.b	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	3 Kelompok	0	0	0	0	0	0	3	0		Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Tersedianya Profil kecamatan dengan baik	Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	1 Dokumen									0	
			Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang	Fasilitasi kegiatan musrenbang Tk. Kecamatan	1 Kali	1	1	0	0	0	0	0	0	1 Kali	
			Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BumDESA) yang terbentuk, aktif dan bisa menghasilkan PAD	Memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BumDESA).	14 Bumdesa										

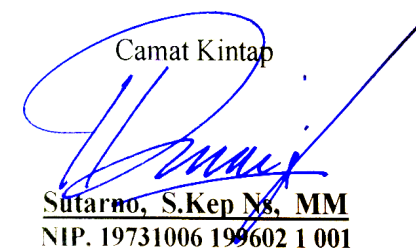
			Jumlah kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	Memfasilitasi kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa	1 Kerjasama										
			Memfasilitasi penyaluran usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	Jumlah penyaluran usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan	3 Kali										
			Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	14 Dokumen										
1.c	Kepala Seksi Kemasyarakatan		Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang sosial	Memberikan Pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan	10 Kelompok	2	2	2	2	3	3	3	3	10 Kelompok	Kepala Seksi Kemasyarakatan
			Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	Fasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	10 Kegiatan	2	2	2	2	3	2	3	1	7 Kegiatan	
			Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan	639 Orang	630	630	630	630	630	630	630	630	630 Orang	

1.d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban		Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	20 Kali	5	4	5	4	5	4	5	4	16 Kali	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
			Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	14 Kelompok	1	0	1	2	1	2	1	0	4 Kelompok	
			Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di Monitoring	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	20 Kali	5	5	5	5	5	6	5	0	16 Kali	
			Jumlah sosialisasi penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di Monitoring	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	6 Kali	1	0	2	2	1	2	2	0	4 Kali	
1.e	Kepala Seksi pelayanan		Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan sesuai SOP	Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	13 Layanan	14	14	14	14	14	14	14	14	14 Layanan	Kepala Seksi pelayanan
			Jumlah aduan masyarakat yang difasilitasi	Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	15 Pengaduan	4	6	4	3	4	3	3	0	11 Aduan	
			Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN)	1800 Dokumen	450	400	450	400	450	400	450	350	1550 Dokumen	
2	Sekretaris Kecamatan		Nilai RB	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	81	81		81		81		81		89,94	Sekretaris Kecamatan

			Nilai Sakip		50	50		50		50		50		55,64	
			Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
2.a	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan		Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.	Menyusun dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan	4 Dokumen	2	2	2	2	0	0	0	0	4 Dokumen	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
			Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Menyusun laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	7 Laporan	1	1	2	2	1	1	3	3	7 Laporan	
2.b	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang terlayani dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku	Memberikan pelayanan administrasi perkantoran	11 Dokumen	3	3	3	3	3	3	2	2	11 Dokumen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	16 Buah	2	0	4	10	6	0	4	4	14 Buah	
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	2	3	3	3	4	4	2	2	11 Dokumen	

Kintap, 28 Desember 2023

Camat Kintap



Sutarno, S.Kep Nb, MM
NIP. 19731006 19602 1 001

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu Anggaran Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 5.240.486.010,- meliputi Belanja Operasional dan Belanja Modal, meningkat dari Tahun 2022 pagu kecamatan kintap sebesar Rp 3.968.244.635,- Adapun realisasi belanja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.756.796.603,- lebih tinggi dari Realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp 3.171.121.523,-

1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023

Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Rp 4.957.639.051.00	Rp 5.240.486.010	Rp 4.756.796.603	90,77 %

Berikut disampaikan Dalam Tabel perbandingan Belanja Tahun 2023 dan 2022

Tahun	2023	2022
Pagu Anggaran	Rp 5.240.486.010,-	Rp 3.968.244.635,-
Realisasi Belanja	Rp 4.756.796.603,-	Rp 3.171.121.523,-

Rincian Belanja untuk Tahun 2023 kami sampaikan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2023

	Pagu	Realisasi	Rasio
Belanja Operasional	Rp 5.153.221.422		
Belanja Pegawai	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.237.720.775	Rp 2.053.727.281	91,78%
Belanja Hibah	Rp 842.580.000	Rp 842.580.000	100 %

Belanja Modal		Rp 87.264.588		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 80.564.588	Rp 71.678.000	88,97%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 6.700.000	Rp 6.700.000	100 %

Jumlah realisasi belanja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. 1 Belanja Operasional

Anggaran dan realisasi belanja operasional Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023 terdiri dari :

	Pagu	Realisasi	Rasio
Belanja Operasional	Rp 5.153.221.422	Rp 4.678.418.603	90,79%
Belanja Pegawai	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97%
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.237.720.775	Rp 2.053.727.281	91,78%
Belanja Hibah	Rp 842.580.000	Rp 842.580.000	100 %

Belanja Operasional Kecamatan Kintap terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Total Pagu Belanja Operasional untuk Tahun 2023 sebesar Rp 5.153.221.422,00 dengan Realisasi Sebesar Rp 4.678.418.603 (90,79 %)

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasional, disajikan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Kode Rekening	Belanja	Pagu	Realisasi 2023	Rasio (%)	Realisasi 2022
5.1.01	Belanja Pegawai	2.072.920.647	1.782.111.322	85,97	1.785.506.551

5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.074.465.723	874.583.302	81,40	812.251.833
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	672.243.956	576.398.000	85,74	570.082.428
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	641.243.956	576.398.000	89,89	570.082.428
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	31.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	74.276.744	65.595.744	88,31	58.983.526
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	73.676.744	65.595.744	89,03	58.983.526
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	600.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	94.168.000	78.020.000	82,85	80.360.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	94.168.000	78.020.000	82,85	80.360.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.316.000	6.480.000	37,42	5.780.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.316.000	6.480.000	62,82	5.780.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.797.137	36.572.100	63,28	35.485.800
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.797.137	36.572.100	70,61	35.485.800
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	64.343.887	52.931.207	82,26	894.433
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	61.843.887	52.931.207	85,59	894.433
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.500.000	0,00	0,00	0,00

5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.000	7.329	20,94	7.865
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.000	7.329	29,32	7.865
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	60.884.999	53.821.157	88,40	55.991.048
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	56.000.000	53.821.157	96,11	55.991.048
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.884.999	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.550.000	1.189.429	33,51	1.166.686
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.200.000	1.189.429	37,17	1.166.686
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	350.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.850.000	3.568.336	36,23	3.500.047
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.100.000	3.568.336	44,05	3.500.047
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	998.454.924	907.528.020	90,89	973.254.718
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	964.548.925	875.952.373	90,81	973.254.718
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	936.173.357	875.952.373	93,57	973.254.718

5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	28.375.568	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	33.905.999	31.575.647	93,13	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	33.905.999	31.575.647	93,13	0,00

Total Pagu Belanja Pegawai untuk Tahun 2023 sebesar Rp 2.072.920.647 dengan Realisasi sebesar Rp 1.782.111.322 (85,97 %)

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasional dengan anggaran / realisasi Tahun 2023 sebagai berikut :

Kode Rekening	Belanja	Pagu	Realisasi 2023	Rasio (%)	Realisasi 2022
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.720.775	2.053.727.281	91,78	515.189.809
5.1.02.01	Belanja Barang	755.427.588	629.529.320	83,33	106.437.842
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	755.427.588	629.529.320	83,33	106.437.842
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	0,00	0,00	746.560
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	108.330.814	91.818.370	84,76	19.932.005
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.225.288	3.690.000	40,00	12.037.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.810.133	1.295.000	71,54	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000	4.000.000	100,00	1.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.069.475	7.805.000	64,67	5.172.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.384.244	12.345.850	75,35	4.329.277
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.509.108	3.673.100	66,67	4.980.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	34.593.705	29.250.000	84,55	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	34.831.467	30.566.000	87,75	0,00

	untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat				
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	6.117.760	5.460.000	89,25	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	283.425.000	238.695.000	84,22	43.741.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	26.100.000	17.400.000	66,67	11.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000	0,00	0,00	3.000.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.434.446	7.260.000	86,08	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	158.286.000	142.211.000	89,84	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	41.810.148	34.060.000	81,46	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	735.511.027	718.684.866	97,71	273.544.481
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	562.289.479	548.018.330	97,46	257.158.407
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.300.000	9.700.000	94,17	1.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	64.750.000	61.503.000	94,99	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.400.000	4.400.000	100,00	46.050.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	136.800.000	136.800.000	100,00	136.800.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.800.000	8.300.000	70,34	500.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.600.000	45.600.000	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.800.000	22.800.000	100,00	22.800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	126.000.000	126.000.000	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	95.250.000	94.950.000	99,69	11.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.270.000	7.250.000	99,72	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.440.000	4.380.000	98,65	3.795.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.398.966	20.793.630	88,87	28.440.407
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.480.513	5.541.700	58,45	6.173.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.963.508	14.476.536	96,75	13.636.074

5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.183.776	13.183.776	100,00	12.528.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	790.992	677.154	85,61	492.469
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	988.740	615.606	62,26	615.605
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	145.633.040	143.565.000	98,58	2.350.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.800.000	4.800.000	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.247.600	14.100.000	98,96	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	14.660.100	12.945.000	88,30	0,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0	0,00	0,00	350.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	69.379.340	69.220.000	99,77	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	34.546.000	34.500.000	99,87	2.000.000
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	8.000.000	8.000.000	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.625.000	12.625.000	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	12.625.000	12.625.000	100,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0	0,00	0,00	400.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	0	0,00	0,00	400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	87.100.000	85.342.690	97,98	74.049.811
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.100.000	85.342.690	97,98	74.049.811
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	58.000.000	57.309.390	98,81	54.810.811
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000	7.588.300	94,85	10.304.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000	9.375.000	93,75	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.200.000	4.200.000	100,00	3.360.000

5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0	0,00	0,00	1.280.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.200.000	4.170.000	99,29	4.295.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.700.000	2.700.000	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	241.142.160	230.058.405	95,40	61.157.675
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	241.142.160	230.058.405	95,40	61.157.675
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171.153.901	170.000.905	99,33	31.162.675
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.988.259	60.057.500	85,81	29.995.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	418.540.000	390.112.000	93,21	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	418.540.000	390.112.000	93,21	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	418.540.000	390.112.000	93,21	0,00

Total Pagu Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 sebesar Rp 2.237.720.775 dengan Realisasi sebesar Rp 2.053.727.281 (91,78 %)

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Belanja Operasional dengan anggaran / realisasi Tahun 2023 sebagai berikut :

Kode Rekening	Belanja	Pagu	Realisasi 2023	Rasio (%)	Realisasi 2022
5.1.05	Belanja Hibah	842.580.000	842.580.000	100	845.004.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	842.580.000	842.580.000	100	845.004.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	842.580.000	842.580.000	100	845.004.000

5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	842.580.000	842.580.000	100	845.004.000
-------------------	--	-------------	-------------	-----	-------------

Total Pagu Belanja Hibah untuk Tahun 2023 sebesar Rp 842.580.000 dengan Realisasi sebesar Rp 842.580.000 (100 %)

1. 2 Belanja Modal (BM)

Belanja Modal pada SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Kode Rekening	Belanja	Pagu	Realisasi 2023	Rasio (%)	Realisasi 2022
5.2	BELANJA MODAL	87.264.588	78.378.000,00	89,82	24.050.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.564.588	71.678.000,00	88,97	24.050.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	53.259.265	48.253.000,00	90,60	6.950.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	53.259.265	48.253.000,00	90,60	6.950.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	53.259.265	48.253.000,00	90,60	6.950.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.305.323	23.425.000,00	85,79	17.100.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	24.966.053	21.450.000,00	85,92	9.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	24.966.053	21.450.000,00	85,92	9.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.339.270	1.975.000,00	84,43	7.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.339.270	1.975.000,00	84,43	7.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.700.000	6.700.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.700.000	6.700.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.700.000	6.700.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.700.000	6.700.000,00	100,00	0,00

Total Pagu Belanja Modal untuk Tahun 2023 sebesar Rp 87.264.588,00 dengan Realisasi sebesar Rp 78.378.000,00 (89,82 %)

Kecamatan Kintap hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Kintap Tahun 2023 dapat terlaksana untuk memenuhi pelayanan walaupun realisasi anggaran maupun fisik tidak mencapai 100%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 sudah baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Kintap melaksanakan sebanyak 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.957.639.051.00.-. Setelah adanya APBD perubahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan Kintap mengalami penurunan Menjadi Rp 5.240.486.010,00

Evaluasi dari Serapan Anggaran dalam pencapaian kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output	Target/ Realisasi	APBD Perubahan	Serapan	Persentase
Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien (Nilai SAKIP)							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok / 7 Dok	Rp 4.592.958	Rp 4.437.600	96,62%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap / 4Lap	Rp 3.159.948	Rp 3.156.800	99,90%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	11 Orang /Bulan	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 dok/dok	Rp 3.154.898	Rp 2.916.200	92,43%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	2 paket/ 2Paket	Rp 5.509.108	Rp 3.673.100	66,67%

		Penyedia Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	0 paket/0paket	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket/ 2Paket	Rp 29.508.802	Rp 19.407.300	65,77%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 lap/300lap	Rp 210.738.259	Rp 187.876.090	89,15%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit/6Unit	Rp 80.564.588	Rp 71.678.000	88,97%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan / 12 Laporan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan/ 12 Laporan	Rp 44.019.479	Rp 37.415.330	85,00%

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan / 12 Laporan	Rp 220.163.508	Rp 219.676.536	99,78%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit/ 1 Unit	Rp 29.000.000	Rp 28.470.700	98,17%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan kendaraan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit/ 4 Unit	Rp 37.000.000	Rp 36.426.990	98,45%
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dielihara	1 Unit/ 1 Unit	Rp 10.000.000	Rp 9.375.000	93,75%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unt / Unit	Rp 11.100.000	Rp 11.070.000	99,73%
Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat (IKM)							

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan						
		koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan/ 12 Laporan	Rp 5.843.249	Rp 5.349.520	91,55%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						

		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara reublik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	20 Orang	Rp 69.888.464	Rp 53.670.000	76,79%
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	5000 Orang	Rp 2.291.918.497	Rp 2.189.293.070	95,52%
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	Rp 8.325.000	Rp 930.000	11,17%

		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	Rp 70.353.725	Rp 64.233.045	91,30%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	Rp 6.750.000	Rp -	0
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 Dok / 2 Dok	Rp 13.974.880	Rp 13.630.000	97,53%
					Rp 5.240.486.010	Rp 4.756.796.603	90,77%

1. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023 SKPD Kecamatan Kintap dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
			2022					2023				
1	Sasaran 1 : Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien											
	Indikator : NILAI SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 3.774.000,00	Rp 1.769.900,00	46,90%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.592.958	Rp 4.437.600	96,62%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.114.000,00	Rp 3.175.000,00	62,08%		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.159.948	Rp 3.156.800	99,90%

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.365.458.270,00	Rp 1.785.506.551,00	75,48%		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.072.920.647	Rp 1.782.111.322	85,97%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 5.264.000,00	Rp 4.764.000,00	90,50%		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 3.154.898	Rp 2.916.200	92,43%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.972.662,00	Rp 4.980.000,00	62,46%		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.509.108	Rp 3.673.100	66,67%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 49.195.208,00	Rp 46.030.305,00	93,57%		Penyediaan Bahan/Material	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 4.650.136,00	Rp 2.665.000,00	57,31%		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 29.508.802	Rp 19.407.300	65,77%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 69.700.000,00	Rp 65.132.675,00	93,45%		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 210.738.259	Rp 187.876.090	89,15%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 25.609.721,00	Rp 24.400.000,00	95,28%		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 80.564.588	Rp 71.678.000	88,97%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
									Penyedia Jasa Surat Menyurat	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	100%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 44.608.935,00	Rp 38.408.407,00	86,10%		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 44.019.479	Rp 37.415.330	85,00%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 241.365.960,00	Rp 218.836.074,00	90,67%		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 220.163.508	Rp 219.676.536	99,78%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 11.000.000,00	Rp 10.304.000,00	93,67%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 29.000.000	Rp 28.470.700	98,17%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 55.000.000,00	Rp 54.810.811,00	99,66%		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 37.000.000	Rp 36.426.990	98,45%

								Pemeliharaan Mebel	Rp 10.000.000	Rp 9.375.000	93,75%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 13.684.200,00	Rp 8.935.000,00	65,29%	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.100.000	Rp 11.070.000	99,73%
2	Sasaran 2 :Meningkatnya kualitas pelayanan pubik kepada masyarakat										
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.996.200,00	Rp 4.216.000,00	28,11%				
	Indikator : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			
								koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 5.843.249	Rp 5.349.520	91,55%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 17.000.000,00	Rp 17.000.000,00	100,00%	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 69.888.464	Rp 53.670.000	76,79%
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 1.029.992.634,00	Rp 879.587.800,00	85,40%	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 2.291.918.497	Rp 2.189.293.070	95,52%
								Penanganan Konflik Sosial Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 8.325.000	Rp 930.000	11,17%
								Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 70.353.725	Rp 64.233.045	91,30%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									

			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
									Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 6.750.000	Rp -	0
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	100,00%		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 13.974.880	Rp 13.630.000	97,53%
					Rp 3.984.985.926,00		79,98 %			Rp 5.240.486.010	Rp 4.756.796.603	90,77%

Pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Kintap melaksanakan sebanyak 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.957.639.051.00,-. Setelah adanya APBD perubahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan Kintap mengalami penurunan Menjadi Rp 5.240.486.010,00. Realisasi belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 4.756.796.603,00,- atau 90,77%,

Sedangkan Pada tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Kintap melaksanakan sebanyak 4 (Empat) program, 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 4.078.007.917.00,-. Setelah adanya APBD perubahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Kecamatan Kintap mengalami penurunan Menjadi Rp 3.968.244.635,00. Realisasi belanja pada tahun 2022 sebesar Rp 3.171.121.523,00,- atau 79,91%,

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kantor Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 merupakan pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan LaKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Camat Kintap Pada Tahun 2023, dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), tercapai 99,77 %, dari Target nilai 89 terealisasi pada nilai 88,80

Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekurangan tidak boleh berhenti, tetapi sebaliknya secara terus menerus diupayakan.

Kami seluruh aparatur Kantor kecamatan Kintap menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan LaKIP ini masih banyak hal yang harus diperbaiki, sehingga evaluasi, saran pendapat maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

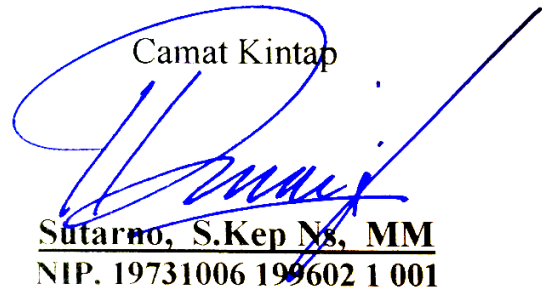
Strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Kintap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.

3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Kintap yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Akhirnya, semoga dengan adanya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LaKIP) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kintap, 19 Januari 2024

Camat Kintap

Sutarno, S.Kep Ns, MM
NIP. 19731006 199602 1 001